



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
INSPEKTORAT DAERAH**

**JL. CIT NYAK DIEN TELP. (0761) 2300 FAX. (0761) 23256  
PEKANBARU**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
IMPLEMENTASI AKIP PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  
TAHUN 2017**



**NOMOR : 700/IP/885  
PEKANBARU : 20 DESEMBER 2018**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
**PEKANBARU**

---

Nomor : 700/IP/885/2018

Pekanbaru, 20 Desember 2018

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi  
AKIP Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Riau Tahun 2017

**Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Riau**

di -

**Pekanbaru**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2017, dengan tujuan:
  - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - 2) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
  - 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2017 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra),

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 67,11 termasuk kategori '**B**' atau **baik**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,60	30	25,05
2	Pengukuran Kinerja	25	15,00	25	16,25
3	Pelaporan Kinerja	15	9,45	15	9,62
4	Evaluasi Internal	10	2,33	10	4,20
5	Capaian Kinerja	20	13,11	20	12,00
<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>		<b>100</b>	<b>65,50</b>	<b>100</b>	<b>67,11</b>
<b>TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>B</b>		<b>B</b>	

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja terdiri dari 2 sub komponen, 6 sub-sub komponen dan 39 indikator. Capaian nilai kinerja untuk komponen Perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 memperoleh nilai 25,05 dari bobot nilai 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

##### 4.1.1. Sub Komponen Perencanaan Strategis

Hasil penilaian pada sub komponen ini meliputi penilaian terkait pemenuhan Renstra (9 indikator), kualitas Renstra (8 indikator) dan implementasi Renstra (3 indikator). Dari hasil penilaian diperoleh capaian nilai kinerja untuk ketiga sub-sub komponen tersebut adalah sebesar 8,30 dari bobot nilai 10,00.

##### 4.1.2. Sub Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil penilaian pada sub komponen ini meliputi penilaian terkait pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4 indikator), kualitas

perencanaan kinerja tahunan (10 indikator), implementasi perencanaan kinerja tahunan (5 indikator). Dari hasil penilaian diperoleh capaian nilai kinerja untuk ketiga sub komponen tersebut adalah sebesar 16,75 dari jumlah bobot sebesar 20,00.

#### **4.2. Pengukuran Kinerja**

Komponen Pengukuran Kinerja terdiri dari 3 sub komponen dan 20 indikator. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 16,25 dari bobot nilai 25,00. Sub komponen pengukuran kinerja yang dinilai tersebut, terdiri dari:

##### **4.2.1. Sub Komponen Pemenuhan Pengukuran**

Hasil penilaian pada sub komponen ini meliputi penilaian terkait 4 indikator. Dari hasil penilaiannya diperoleh capaian nilai kinerja untuk sub komponen tersebut adalah sebesar 4,38 dari bobot nilai 5,00.

##### **4.2.2. Sub Komponen Kualitas Pengukuran**

Hasil penilaian pada sub komponen ini meliputi penilaian terkait 10 indikator. Dari hasil penilaiannya diperoleh capaian nilai kinerja untuk sub komponen tersebut adalah sebesar 8,13 dari jumlah bobot sebesar 12,50 pencapaian nilai yang belum memadai ini disebabkan pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan pengelolaan teknologi informasi.

##### **4.2.3. Implementasi Pengukuran**

Hasil penilaian pada sub komponen ini meliputi penilaian terkait 6 indikator. Dari hasil penilaiannya diperoleh capaian nilai kinerja untuk sub komponen tersebut adalah sebesar 3,75 dari jumlah bobot sebesar 7,50.

#### **4.3. Pelaporan Kinerja**

Komponen Pelaporan kinerja terdiri dari 3 sub komponen, dan 16 indikator. Pelaporan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 9,62 dari bobot nilai 15,00 dengan uraian sebagai berikut:

#### **4.3.1. Sub Komponen Pemenuhan Pelaporan**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 4 indikator. Dari Hasil penilaian terhadap Pemenuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) memperoleh nilai sebesar 2,81 dari standar/bobot nilai 3,00.

#### **4.3.2. Sub Komponen Penyajian Informasi Kinerja**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 7 indikator. Dari hasil penilaian terhadap Penyajian Informasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 4,10 dari bobot nilai 7,50.

#### **4.3.3. Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 5 indikator. Dari hasil penilaian terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 2,70 dari bobot nilai 4,50.

### **4.4. Evaluasi Internal**

Komponen evaluasi internal terdiri dari 3 sub komponen dan 11 indikator. Evaluasi kinerja internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 4,20 dari bobot nilai 10,00 yang terdiri dari penilaian atas Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi, Sub Komponen Kualitas Evaluasi, dan Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

#### **4.4.1. Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 3 indikator. Dari Hasil penilaian Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi ini memperoleh nilai sebesar 1,78 dari standar/bobot nilai 2,00.

#### **4.4.2. Sub Komponen Kualitas Evaluasi**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 6 indikator. Dari hasil penilaian Sub Komponen Ini memperoleh nilai sebesar 1,67 dari bobot nilai 5,00, hal ini disebabkan:

- ① Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- ② Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan

- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.

#### **4.4.3. Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 2 indikator. Dari hasil penilaian Sub Komponen ini memperoleh nilai sebesar 0,75 dari bobot nilai 3,00, hal ini disebabkan;

- Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

#### **4.5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Komponen Sasaran/Kinerja Organisasi terdiri dari 2 sub komponen dan 6 indikator. Penilaian terhadap Sasaran/Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 12,00 dari bobot nilai 20,00 dengan uraian sebagai berikut:

##### **4.5.1. Sub Komponen Kinerja Yang Dilaporkan (Output)**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 3 indikator. Dari Hasil penilaian Sub Komponen ini memperoleh nilai sebesar 4,50 dari standar/bobot nilai 7,50, hal ini disebabkan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

##### **4.5.2. Sub Komponen Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)**

Hasil penilaian sub komponen ini meliputi penilaian terkait 3 indikator. Dari hasil penilaian Sub Komponen Ini memperoleh nilai sebesar 7,50 dari bobot nilai 12,50, capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### **5. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang Belum Ditindaklanjuti**

Rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 700/IP/824/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang belum ditindaklanjuti yaitu:

### **5.1. Pengukuran Kinerja**

- Melakukan pengukuran kinerja yang dikembangkan dengan menggunakan pengelolaan teknologi informasi.

### **5.2. Evaluasi Internal**

- Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
- Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Terhadap rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2016 yang belum ada tindak lanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan saran dan rekomendasinya.

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yakni sebagai berikut:

#### **6.1. Untuk Pengukuran Kinerja:**

- Pengukuran kinerja agar dikembangkan dengan menggunakan pengelolaan teknologi informasi.

#### **6.2. Untuk Evaluasi Internal:**

- Evaluasi program agar memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi agar memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perbaikan setiap periode.
- Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



**Drs. EVANDES FAJRI, Ak, CA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641207 199203 1 010

Tembusan :

- Yth. Gubernur Riau
- Sekretaris Daerah Provinsi Riau



**LEMBAR KRITERIA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		30,00	83,51%	25,05
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		10,00	83,02%	8,30
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		2,00	91,67%	1,83
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		B	0,75
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,75
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		5,00	84,38%	4,22
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0,75
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		20,00	83,75%	16,75
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		10,00	82,50%	8,25
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		C	0,50
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00

	<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>4,50</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0,50
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
	<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>16,25</b>
	<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>4,38</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
	<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>65,00%</b>	<b>8,13</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0,75
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		C	0,50
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		C	0,50
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>50,00%</b>	<b>3,75</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		C	0,50
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		C	0,50
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
	<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>64,11%</b>	<b>9,62</b>
	<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>2,81</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
	<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>54,71%</b>	<b>4,10</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75

7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0,50
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,70</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>41,97%</b>	<b>4,20</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>89,00%</b>	<b>1,78</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>1,67</b>
4	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0,50
5	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		D	0,25
7	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		D	0,25
9	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,75</b>
10	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		D	0,25
11	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>12,00</b>
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>4,50</b>
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>7,50</b>
4	Target dapat dicapai			3,75
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,25
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,50
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>67,11%</b>	<b>67,11</b>